

PERDAGANGAN CENGKIH DI AMBON TAHUN 1607–1679: MONOPOLI VOC DAN TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK

Wiranto Tjan¹ dan Zulkifli²

^{1,2}Istitut Sains dan Kependidikan (ISDIK) Kie Raha Maluku Utara
Email: tjanwiranto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perubahan perdagangan cengkih di Ambon pada 1607–1679, terutama peran Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dalam membangun monopoli serta implikasinya bagi masyarakat Maluku Selatan. Kajian dilakukan melalui pendekatan sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi berdasarkan literatur serta rujukan dokumen historis yang termuat dalam bahan penelitian. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa penguasaan VOC dibangun secara bertahap melalui kontrak perdagangan eksklusif dengan penguasa lokal, pembentukan perangkat administratif, pengaturan pembelian dan ekspor, serta pengawasan bersenjata. Pelayaran hongik dan ekstirpasi digunakan untuk membatasi perdagangan di luar jaringan VOC dan mengendalikan pasokan. Kebijakan tersebut mempersempit pilihan pemasaran produsen, mengubah kewenangan ekonomi penguasa lokal, dan memicu penolakan serta konflik. Temuan ini menegaskan bahwa monopoli cengkih bukan sekadar pengaturan pasar, melainkan mekanisme yang menghubungkan kepentingan komersial dengan pembentukan kekuasaan kolonial. Kesimpulan bersifat interpretatif karena verifikasi arsip primer dan rincian kuantitatif masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Kata kunci: Ambon; Cengkih; Monopoli; Perdagangan Kolonial; VOC.

ABSTRACT

This article examines the transformation of the clove trade in Ambon from 1607 to 1679, focusing on the Dutch East India Company (VOC), its monopolistic practices, and their consequences for communities in South Maluku. It adopts a historical approach encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, drawing on historical studies and archival references reported in the research materials. The analysis suggests that VOC control evolved through exclusive trading agreements with local authorities, administrative consolidation, regulation of purchasing and exports, and armed maritime surveillance. Hongi expeditions and clove-tree extirpation were employed to restrict competing trade networks and regulate supply. These measures reduced producers' marketing options, reshaped local political authority, and contributed to resistance and conflict. The study argues that the clove monopoly was not simply a market arrangement but a mechanism through which commercial objectives and colonial state-building became mutually reinforcing. Its conclusions remain interpretive because independent archival verification and the assessment of quantitative claims require further investigation.

Keywords: Ambon; Clove; Colonial Trade; Monopoly; Voc.

PENDAHULUAN

Perdagangan cengkih menempati posisi penting dalam sejarah ekonomi kepulauan Maluku. Jauh sebelum ekspansi bangsa Eropa, cengkih telah beredar melalui jaringan antarpulau dan antarkawasan yang menghubungkan wilayah produksi di Maluku dengan pedagang Asia dan Timur Tengah (Donkin, 2003; Van Leur, 1960). Perdagangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat bukan pelaku pasif yang baru memasuki ekonomi global setelah kedatangan bangsa Eropa. Sebaliknya, intervensi Portugis dan kemudian Belanda memasuki jaringan perdagangan yang telah memiliki pelaku, jalur distribusi, dan kepentingan politiknya sendiri.

Nilai ekonomi cengkih berkaitan dengan permintaan lintas kawasan dan konsentrasi geografis produksinya. Keadaan ini mendorong persaingan untuk memperoleh pasokan secara stabil dan menguasai jalur ekspor. Dalam kajian sejarah ekonomi Indonesia, transformasi perdagangan menjadi penguasaan wilayah dapat dibaca melalui hubungan antara kepentingan komersial, intervensi politik, dan penggunaan kekuatan bersenjata (Kartodirdjo, 1987; Van Leur, 1960). Kerangka tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa persaingan mendapatkan cengkih di Maluku berangsur-angsur terkait dengan perjanjian antarpenguasa, penguasaan benteng, pembentukan lembaga pemerintahan, dan operasi militer.

Di Ambon, kehadiran Belanda pada akhir abad XVI mula-mula diarahkan pada kegiatan perdagangan. Perjalanan Wijbrand van Warwijk pada 1599 dan Steven van der Hagen pada 1600 menjadi bagian dari proses menjalin hubungan dengan pemimpin setempat, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan menandingi kekuatan Portugis. Pengambilalihan benteng Portugis oleh Belanda pada 1605 merupakan latar penting bagi konsolidasi berikutnya (de Graaf, 1977; Blussé & de Moor, 1983). Dengan demikian, periode 1607–1679 perlu dipahami sebagai bagian dari rangkaian perubahan yang bermula sebelum 1607, bukan sebagai titik awal mutlak perdagangan cengkih.

Kajian terdahulu membahas sejarah Ambon, relasi perdagangan dengan kekuasaan kolonial, dan kebijakan monopoli VOC dari sudut pandang yang berbeda. Donkin (2003) menekankan lalu lintas rempah sebelum kedatangan bangsa Eropa; Knaap (2004) mengkaji hubungan VOC dengan penduduk Ambon pada paruh kedua abad XVII; sedangkan Leirissa (1973) membahas kebijakan VOC untuk memperoleh monopoli di Maluku Tengah pada 1615–1652. Penelitian ini menyusun kembali hubungan antara perjanjian eksklusif, pengawasan maritim, pengendalian produksi, dan respons masyarakat dalam rentang 1607–1679. Fokus tersebut merupakan sintesis tematik dan kronologis atas bahan yang tersedia, bukan klaim penemuan arsip baru.

Permasalahan utama penelitian ini ialah bagaimana VOC membangun dan mempertahankan kontrol perdagangan cengkih di Ambon dan bagaimana kontrol tersebut berhubungan dengan perubahan ekonomi serta politik lokal. Secara khusus, artikel ini menguraikan konteks jaringan cengkih sebelum penguasaan Belanda, tahapan konsolidasi monopoli VOC, dan implikasi kebijakannya bagi produsen, pedagang, serta penguasa lokal. Kajian diharapkan memberi kontribusi bagi sejarah ekonomi Maluku sekaligus menjadi bahan untuk pembelajaran kritis mengenai hubungan antara perdagangan dan kolonialisme.

KAJIAN TEORI

Perdagangan cengkih dan jaringan ekonomi maritim

Perdagangan rempah melibatkan hubungan antara produksi di daerah kepulauan dan distribusi melalui jaringan pelayaran. Posisi cengkih sebagai komoditas bernilai tinggi tidak dapat dilepaskan dari pedagang dan pelabuhan perantara yang menghubungkan Maluku dengan pasar di luar wilayah produksi (Donkin, 2003). Karena itu, sejarah perdagangan cengkih mencakup bukan hanya aktivitas jual beli, tetapi juga penguasaan akses, informasi, sarana transportasi, dan hubungan dengan otoritas setempat.

Pendekatan sejarah ekonomi memungkinkan penelitian menempatkan pedagang Asia, penguasa negeri, dan kongsi dagang Eropa dalam satu ruang analisis. Van Leur (1960) memberikan perspektif penting mengenai jaringan perdagangan Asia sebelum dan selama ekspansi Eropa. Perspektif tersebut mengingatkan bahwa dominasi VOC harus dilihat sebagai proses yang diperebutkan dan dinegosiasikan, bukan sebagai penggantian pasar yang berlangsung seketika.

Monopoli sebagai instrumen ekonomi politik

Monopoli dipahami sebagai upaya satu pelaku mendominasi hak pembelian dan penyaluran komoditas serta membatasi masuknya pesaing. Pengertian tersebut dipakai secara historis, bukan untuk mengasumsikan bahwa VOC selalu berhasil menutup seluruh perdagangan di luar jalurnya. Kontrak eksklusif, pembatasan akses kepada produsen, penetapan harga pembelian, dan pengawasan laut merupakan bentuk penghambatan masuknya pesaing (*barriers to entry*). Pembacaan ekonomi politik atas monopoli memberi perhatian pada keterkaitan antara pengendalian komoditas, dukungan institusional, dan pemaksaan (Bulkin, 1985; Rahardjo, 1985).

Dalam konteks VOC, kepentingan ekonomi perlu dianalisis bersamaan dengan kapasitas birokrasi dan militer. Monopoli dipertahankan bukan hanya oleh keunggulan perdagangan, melainkan juga melalui perjanjian politik, pengawasan jalur distribusi, dan penggunaan aparat bersenjata. Kendati demikian, keberadaan pedagang Makassar, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Inggris dalam jaringan kawasan menunjukkan keterbatasan pelaksanaan monopoli secara menyeluruh (Knaap, 2004; Leirissa, 1973).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi perkembangan perdagangan cengkih di Ambon selama 1607–1679. Prosedur analisis meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1975; Kuntowijoyo, 1995). Lingkup temporal ditetapkan pada tahun 1607–1679, sedangkan peristiwa tahun 1599–1605 digunakan sebagai konteks awal. Lingkup spasial berpusat pada Ambon dengan memperhatikan keterhubungannya dengan Hitu, Haruku, Seram, kepulauan Lease, dan Ternate ketika diperlukan untuk memahami jaringan perdagangan.

Heuristik dilakukan melalui penelaahan sumber sejarah serta literatur yang disebutkan dalam bahan manuskrip, termasuk kajian de Graaf (1977), Leirissa (1973), Donkin (2003), dan Knaap (2004). Interpretasi disusun melalui kategorisasi instrumen monopoli—kontrak, birokrasi, pengendalian produksi, dan kekuatan bersenjata—serta keterkaitannya dengan respons sosial ekonomi. Tahap historiografi menyajikan hasil secara kronologis-analitis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan cengkih sebelum konsolidasi VOC

Sebelum Belanda membangun kedudukan permanen, perdagangan cengkih Maluku telah melibatkan pelaku lokal dan pedagang lintas kawasan. Donkin (2003) menunjukkan pentingnya sirkulasi cengkih dalam perdagangan Asia sebelum kedatangan bangsa Eropa, sedangkan Van Leur (1960) menggarisbawahi keberadaan jaringan perdagangan Asia sebagai struktur historis yang tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, penetrasi VOC lebih tepat dipahami sebagai upaya menguasai dan menata ulang jaringan yang sudah berlangsung daripada menciptakan pasar cengkih dari awal.

Ambon memiliki arti strategis dalam lalu lintas perairan Maluku Selatan. Posisi pelabuhan, benteng, dan koneksi dengan negeri-negeri serta pulau sekitar membuat wilayah ini relevan bagi pengumpulan cengkih dan pergerakan armada. Namun, istilah “Ambon” perlu dibaca secara kontekstual: dalam sebagian literatur sejarah, cakupan administrasi atau jaringan perdagangan Ambon dapat melampaui Pulau Ambon secara geografis. Perbedaan ini penting agar dinamika Seram, Lease, dan Ternate tidak otomatis dianggap terjadi di Pulau Ambon saja (de Graaf, 1977; Knaap, 2004).

Pada tahap awal, hubungan Belanda dengan penguasa lokal dibentuk oleh kepentingan dagang dan persaingan dengan Portugis. Pengambilalihan benteng pada 1605 memberi basis logistik dan politik bagi Belanda. Peristiwa tersebut merupakan pendahuluan langsung bagi kontrak dan intervensi perdagangan dalam rentang utama penelitian. Kedudukan benteng memungkinkan pengawasan yang lebih berkesinambungan daripada perdagangan musiman oleh armada yang singgah (de Graaf, 1977; Blussé & de Moor, 1983).

Perjanjian eksklusif dan pembentukan hambatan perdagangan

Dalam rekonstruksi kronologis, perjanjian antara VOC dan penguasa lokal menjadi instrumen awal penguasaan perdagangan. Kesepakatan VOC dengan Kesultanan Ternate pada 26 Mei 1607 disebut mengatur penjualan cengkih kepada loji Kompeni dengan ketentuan harga yang disepakati. Kontrak dengan penguasa Haruku pada 1609 juga digambarkan mengarahkan penjualan cengkih kepada Belanda. Narasi ini menunjukkan pentingnya hubungan antara otoritas politik lokal dan pembentukan akses eksklusif terhadap komoditas (Leirissa, 1973; de Graaf, 1977).

Secara ekonomi, kontrak yang membatasi pembeli mengurangi pilihan produsen serta mempersempit peluang pedagang pesaing memperoleh cengkih langsung dari sumber. Akan tetapi, kontrak tidak identik dengan kepatuhan menyeluruh. Pasar alternatif dan hubungan antarpelaku perdagangan tetap menjadi faktor yang menantang pengawasan VOC. Oleh karena itu, monopoli harus dipandang sebagai proses pembentukan dan penegakan aturan perdagangan, bukan keadaan pasar yang sejak awal sepenuhnya tertutup.

Pilihan sebagian penguasa lokal untuk bekerja sama dengan Belanda juga perlu dipahami dalam konteks persaingan politik pada masa itu. Kesepakatan awal dapat berfungsi sebagai strategi menghadapi pihak lain, meskipun kemudian konsekuensinya membatasi ruang tawar penguasa negeri. Dengan demikian, penguasa lokal merupakan aktor yang bernegosiasi dalam situasi politik tidak seimbang, bukan sekadar kelompok yang sepenuhnya menolak atau menerima kehadiran VOC.

Birokrasi, hukum, dan pengawasan maritim

Konsolidasi monopoli berlangsung melalui pembentukan perangkat kelembagaan. Dalam bahan penelitian, Adriaan Maertenszoon Blok disebut membentuk lembaga pengadilan yang melibatkan raja dan orangkaya pada 1615; perkembangan lebih lanjut berlangsung pada 1617 pada masa Herman van Speult. Perluasan wewenang kelembagaan tersebut menandai bertambahnya kemampuan VOC untuk mengaitkan pengaturan perdagangan dengan keputusan pemerintahan dan hukum (de Graaf, 1977; Leirissa, 1973).

Pengawasan laut menjadi unsur penting karena cengkih bergerak melalui jalur antarpulau. Pelayaran hongi dilakukan dengan kora-kora dan melibatkan tenaga dari negeri-negeri setempat. Dalam sistem pengawasan VOC, ekspedisi tersebut berperan untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan menekan penjualan kepada pihak lain. Kewajiban menyediakan perahu dan pendayung menunjukkan bahwa penegakan monopoli memerlukan mobilisasi sumber daya penduduk, tidak hanya pembiayaan oleh kongsi dagang (Knaap, 2004; Leirissa, 1973).

Perpaduan kontrak, lembaga administratif, dan patroli bersenjata memperlihatkan perubahan posisi VOC: dari pembeli dalam jaringan dagang menjadi pihak yang turut menetapkan aturan bagi pelaku ekonomi. Transformasi inilah yang menjelaskan mengapa monopoli cengkih berdampak pada struktur kekuasaan dan bukan hanya pada transaksi pasar.

Ekstirpasi dan pengendalian sisi produksi

Di samping pembatasan penjualan, VOC menggunakan kebijakan yang memengaruhi produksi cengkih. Ekstirpasi atau pemusnahan pohon cengkih di wilayah tertentu merupakan cara membatasi pasokan di luar pengawasan dan mengurangi peluang penjualan kepada pesaing. Bahan historis yang dikaji menyebut pelaksanaan tindakan tersebut di sejumlah wilayah Ambon, Lease, dan Seram pada masa Herman van Speult. Tindakan semacam ini memperlihatkan bahwa strategi monopoli bergerak dari pengaturan distribusi ke intervensi terhadap sumber komoditas (Leirissa, 1973; Knaap, 2004).

Bahan penelitian juga menyebut ketentuan penanaman cengkih pada masa van Gorcum sejak 1626. Dua kecenderungan tersebut sekilas tampak bertentangan: pohon cengkih dihancurkan di satu tempat, sedangkan penanamannya diwajibkan di tempat lain. Namun, bila penguasaan pasokan merupakan tujuan utamanya, kedua kebijakan dapat dibaca sebagai upaya memusatkan produksi di wilayah yang lebih mudah diawasi. Tafsir ini bersifat analitis dan membutuhkan pembuktian lebih rinci melalui dokumen kebijakan per wilayah.

Sistem pengendalian produksi menimbulkan persoalan bagi kebebasan ekonomi penduduk. Penanaman yang ditentukan dari luar dan pembatasan pembeli dapat mengurangi kemampuan rumah tangga produsen mengatur penggunaan tanah, tenaga, serta penjualan hasil panen. Meski demikian, dampak yang dialami satu negeri tidak harus sama dengan negeri lain. Perbedaan lokasi produksi, relasi dengan penguasa, dan intensitas pengawasan perlu diperhatikan sebelum membuat generalisasi bagi seluruh Maluku.

Persaingan, penolakan, dan konflik

Pengawasan VOC tidak menghilangkan jaringan perdagangan pesaing. Pedagang Makassar dan kelompok pedagang Asia lainnya tetap terkait dengan distribusi rempah; keberadaan pesaing Eropa juga menjadi tantangan terhadap klaim monopoli. Ketergantungan VOC pada jaringan pelabuhan dan pedagang perantara memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan mempertahankan sirkulasi komoditas dan keinginan menutup akses pasar dari pesaing (Van Leur, 1960; Knaap, 2004).

Dalam rekonstruksi peristiwa, Kimelaha Hidayat disebut berperan dalam penolakan terhadap kebijakan hongi sekitar 1620, sedangkan Kimelaha Leliato dikaitkan dengan upaya mempertahankan jalur perdagangan alternatif setelah 1624. Operasi militer pada 1625 dan penghancuran pohon cengkih di sejumlah wilayah Seram memperlihatkan eskalasi tindakan VOC ketika kepentingan perdagangannya menghadapi penolakan (Leirissa, 1973; de Graaf, 1977). Identifikasi aktor, tanggal, dan lokasi pada rangkaian ini perlu dicocokkan kembali dengan sumber arsip atau edisi sejarah yang dikutip secara spesifik.

Dari sudut pandang ekonomi politik, konflik semacam itu menunjukkan bahwa penguasaan komoditas tidak selalu dapat diperoleh melalui keunggulan harga atau kontrak sukarela. Monopoli yang membatasi akses pemasaran menciptakan insentif bagi perdagangan di luar izin VOC; sebaliknya, keberadaan perdagangan tersebut mendorong pengawasan dan pemaksaan yang lebih ketat. Hubungan timbal balik antara pembatasan pasar dan resistensi membantu menjelaskan keberlanjutan ketegangan dalam perdagangan cengkih abad XVII.

Dampak terhadap ekonomi dan kewenangan lokal

Dampak ekonomi yang paling langsung adalah menyempitnya pilihan pembeli dan berkurangnya keleluasaan sebagian produsen maupun pedagang untuk menentukan jalur penjualan. Kontrak penyerahan, pengaturan harga, serta pengawasan ekspor menjadikan keputusan perdagangan lebih bergantung pada ketentuan VOC. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas cengkih yang beredar, tetapi juga distribusi hak untuk memutuskan siapa dapat berdagang, di mana, dan dengan syarat apa (Rahardjo, 1985; Leirissa, 1973).

Bahan manuskrip awal mencantumkan angka perubahan produksi internasional dari sekitar 2,4 juta pon pada sekitar 1600 menjadi 700–750 ribu pon sekitar 1700. Angka ini tidak digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan kuantitatif dalam artikel hasil suntingan karena rujukan tabel, definisi wilayah, satuan, dan metode pengukurannya belum tersedia. Selain itu, angka sekitar 1700 berada di luar batas akhir 1679. Perbandingan demikian baru layak disajikan setelah penulis melengkapi sumber dan menjelaskan kesetaraannya.

Secara politik, kemampuan VOC menetapkan aturan jual beli dan mengorganisasi pengawasan menggeser sebagian kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh penguasa setempat. Kontrak-kontrak perdagangan sekaligus menjadi instrumen perubahan relasi kuasa. Namun, proses ini tidak berlangsung seragam: sejumlah penguasa menggunakan kerja sama dengan VOC untuk tujuan politik tertentu, sementara pihak lain mempertahankan jalur dan hubungan dagangnya. Dinamika yang berlapis tersebut lebih memadai untuk menjelaskan perubahan daripada gambaran sederhana tentang dominasi tanpa negosiasi (de Graaf, 1977; Knaap, 2004).

Konsekuensi sosial dan makna historis

Pelayaran hong, kewajiban menyediakan pendayung, tindakan terhadap pohon cengkik, serta operasi militer meningkatkan beban yang ditanggung sebagian komunitas. Penegakan monopoli dapat memengaruhi kerja penduduk, keamanan permukiman, dan hubungan antarkelompok. Bahan penelitian juga menghubungkan peperangan pada abad XVII dengan perubahan demografis di Maluku Tengah, tetapi hubungan sebab-akibat dan besarnya penurunan penduduk tidak dapat ditetapkan tanpa data sensus atau rekonstruksi populasi yang jelas (Knaap, 2004).

Penafsiran yang paling dapat dipertahankan ialah bahwa kontrol perdagangan memperluas jangkauan intervensi VOC ke ranah kehidupan sosial dan politik. Aktivitas komersial menciptakan kebutuhan untuk menguasai pelabuhan dan wilayah produksi; kemampuan penguasaan wilayah kemudian digunakan untuk mengamankan komoditas serta membatasi pesaing. Relasi tersebut menggambarkan saling penguatan antara perdagangan dan kekuasaan kolonial (Kartodirdjo, 1987; Leirissa, 1973).

Secara keseluruhan, kontribusi kajian ini terletak pada penyusunan empat mekanisme yang saling berkaitan: (1) kontrak eksklusif untuk membatasi hak jual beli; (2) birokrasi untuk melembagakan aturan; (3) hong, ekstirpasi, dan pengaturan produksi untuk menegakkan kontrol; serta (4) intervensi politik-militer untuk merespons pelanggaran dan perlawanan. Sintesis ini memperlihatkan monopoli sebagai praktik ekonomi politik yang terus dinegosiasikan dan dipertentangkan. Bagi pembelajaran sejarah ekonomi, kasus Ambon dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pasar memengaruhi institusi dan pengalaman masyarakat, dengan tetap membedakan fakta yang terdokumentasi dari interpretasi historis.

kronologis perubahan kebijakan VOC

Rekonstruksi selama 1607–1679 memperlihatkan tiga kecenderungan yang saling bertaut. Pertama, pada fase awal penguatan kedudukan, VOC berupaya menetapkan akses perdagangan melalui kesepakatan dengan penguasa regional dan negeri-negeri yang terhubung dengan jaringan cengkik. Kontrak 1607 dan 1609 menjadi titik perhatian karena memperlihatkan upaya membatasi pihak yang dapat membeli hasil produksi. Pada fase ini, pembentukan monopoli terutama berlangsung sebagai pengaturan hubungan antara penguasa dan pembeli, meskipun latar kekuatan militer Belanda sudah terbentuk sejak penguasaan benteng pada 1605 (de Graaf, 1977; Leirissa, 1973).

Kedua, pada dekade 1610-an sampai 1620-an, pengaturan transaksi semakin diikuti konsolidasi administratif dan kebijakan pemaksaan. Pembangunan perangkat peradilan, patroli hong, dan intervensi pada penanaman maupun pemusnahan pohon menunjukkan meluasnya instrumen pengendalian. Perluasan ini tidak seharusnya dibaca sebagai urutan tunggal yang sepenuhnya linear. Perjanjian, negosiasi, perdagangan di luar izin, dan tindakan bersenjata dapat terjadi beriringan, bahkan ketika aturan formal sudah berlaku. Analisis tersebut memberi ruang bagi kemungkinan perbedaan pengalaman antara Ambon, Lease, dan Seram (Knaap, 2004; Leirissa, 1973).

Ketiga, pada bagian berikutnya dari abad XVII, kontrol perdagangan tampak sebagai sistem yang harus terus dikelola dalam situasi persaingan dan konflik. Rentang akhir penelitian, 1679, digunakan sebagai batas analitis, bukan sebagai pernyataan bahwa monopoli VOC berakhir pada tahun tersebut. Kajian Knaap (2004), yang membahas Ambon hingga 1696, menunjukkan pentingnya menempatkan fase yang dikaji dalam perkembangan lebih panjang. Pembatasan kronologis diperlukan agar

penjelasan tentang perubahan sesudah 1679 tidak dicampuradukkan dengan temuan periode utama.

Perbandingan fase-fase tersebut menunjukkan bahwa monopoli VOC tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidak adanya larangan berdagang. Ukuran historis yang lebih kaya mencakup siapa yang merumuskan aturan, bagaimana aturan ditegakkan, kemampuan aktor lain mempertahankan jalur alternatif, dan beban yang dialihkan kepada masyarakat. Dengan indikator tersebut, perkembangan monopoli lebih tepat dipahami sebagai pertumbuhan kapasitas institusional untuk membatasi pasar, dengan tingkat keberhasilan yang tetap berbeda-beda menurut wilayah dan waktu.

Implikasi bagi pembelajaran sejarah ekonomi

Kisah perdagangan cengkih di Ambon dapat digunakan sebagai kasus dalam pembelajaran sejarah ekonomi untuk menunjukkan bahwa struktur pasar dibentuk oleh institusi dan relasi kekuasaan. Pembelajaran dapat dimulai dari peta jaringan rempah sebelum ekspansi Eropa, kemudian membandingkannya dengan peraturan perdagangan pada masa VOC. Perbandingan itu membantu peserta didik mengidentifikasi aktor yang memperoleh manfaat, pihak yang menanggung biaya, dan perubahan hak atas produksi maupun distribusi.

Satu pendekatan pembelajaran yang mungkin digunakan adalah analisis multiperspektif terhadap kontrak perdagangan. Peserta didik diminta mengajukan pertanyaan mengenai alasan penguasa lokal menandatangani perjanjian, insentif produsen melakukan penjualan di luar ketentuan, dan alasan VOC memakai pengawasan laut. Kegiatan tersebut perlu disertai pembacaan kritis atas asal-usul dokumen agar sudut pandang pihak kolonial tidak otomatis dianggap mewakili pengalaman seluruh penduduk. Di sini, metode kritik sumber sejarah bukan sekadar tahapan teknis penelitian, melainkan praktik literasi bukti.

Kasus ini juga memungkinkan pengenalan gagasan tentang hambatan masuk pasar, pembeli dominan, pengendalian pasokan, dan biaya sosial suatu kebijakan ekonomi. Meski demikian, analogi dengan konsep ekonomi modern harus dibuat terbatas: kondisi politik, hukum, dan teknologi abad XVII berbeda dari mekanisme pasar masa kini. Dengan menggabungkan analisis historis dan ekonomi secara hati-hati, pembelajaran dapat menyoroti keterkaitan antara pilihan individu, kekuasaan kelembagaan, dan konsekuensi kebijakan dalam masyarakat. Implikasi pedagogis ini merupakan kemungkinan pemanfaatan hasil kajian, bukan hasil pengujian empiris terhadap efektivitas suatu model pembelajaran.

KESIMPULAN

Perdagangan cengkih Ambon pada 1607–1679 memperlihatkan perubahan dari relasi perdagangan dalam jaringan maritim yang telah mapan menuju upaya pengendalian pasar oleh VOC. Penguasaan tersebut dibangun secara bertahap melalui perjanjian dengan penguasa lokal, penguatan administrasi dan hukum, pembatasan pembeli, pengawasan pelayaran, serta intervensi terhadap produksi cengkih.

Praktik monopoli turut mengubah ruang gerak pedagang dan produsen serta memengaruhi kewenangan ekonomi penguasa negeri. Ketika kontrak dan pengaturan pasar tidak cukup menjamin kepatuhan, VOC menggunakan pelayaran hongi dan kekuatan militer, yang pada gilirannya berkaitan dengan penolakan dan konflik. Dengan demikian, sejarah cengkih di Ambon menjelaskan bagaimana kepentingan dagang dapat menjadi pendorong pembentukan kekuasaan kolonial. Penelitian selanjutnya perlu

menguji kembali peristiwa spesifik melalui arsip yang teridentifikasi, membandingkan pengalaman berbagai negeri, serta memperkuat bukti kuantitatif mengenai produksi dan perubahan demografis.

DAFTAR PUSTAKA

Blussé, L., & de Moor, J. (1983). *Nederlanders overzee: De eerste vijftig jaar 1600–1650*. Uitgeverij T. Wever.

Bulkin, F. (1985). *Ekonomi politik monopoli*. Prisma, 14(2).

de Graaf, H. J. (1977). *De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken*. Uitgeverij T. Wever.

Donkin, R. A. (2003). *Between East and West: The Moluccas and the traffic in spices up to the arrival of Europeans*. American Philosophical Society.

Gottschalk, L. (1975). *Mengerti sejarah* (N. Notosusanto, Penerj.). Universitas Indonesia.

Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500–1900, dari emporium sampai imperium*. Gramedia.

Knaap, G. (2004). *Kruidnagelen en christenen: De VOC en de bevolking van Ambon 1656–1696*. KITLV Uitgeverij.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Budaya.

Leirissa, R. Z. (1973). *Kebijaksanaan VOC untuk mendapatkan monopoli perdagangan cengkeh di Maluku Tengah antara tahun 1615 dan 1652*. Dalam *Bunga rampai sejarah Maluku*. Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.

Rahardjo, M. D. (1985). *Tinjauan historis tentang monopoli, peranan negara dan persaingan bebas dalam perkembangan kapitalisme*. Prisma, 14(2).

Van Leur, J. C. (1960). *Indonesian trade and society: Essays in Asian social and economic history*. N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve.